



Gagal Tes Kesehatan, Calon Wajib Diganti

YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menegaskan jika ada kandidat bakal calon wali kota-wakil wali kota yang tak lolos tes kesehatan wajib diganti.

Artinya, empat kandidat yaitu Haryadi Suyuti, Imam Priyono, Heroe Poerwadi, dan Ahmad Fadli wajib lolos tes secara akumulatif yaitu tes jasmani, rohani, dan

bebas narkoba. "Kalau ada salah satu yang tidak lolos, partai pengusung wajib mencari pengganti," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto, kemarin.

Sesuai mekanisme, jika ternyata ada kandidat yang tak lolos tes kesehatan, maka KPU memberi waktu kepada parpol pengusung untuk mencari pengganti calon lain hingga 4 Oktober mendatang. "Hasil pemeriksaan bersifat mengikat. Jadi jika ada calon yang tidak puas dengan hasilnya tidak bisa mengajukan hasil pemeriksaan pembandingan," katanya.

Hasil rangkaian tes kesehat-

an yang dijalani oleh empat kandidat yang digelar di Rumah Sakit Jogja pada Senin-Selasa (26-27/9) sudah diserahkan dari Tim Pemeriksa kepada KPU di kantor KPU Kota Yogyakarta, kemarin. Namun baik pihak Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, BNN Kota Yogyakarta, dan Himpunan Ahli Psikolog, maupun KPU enggan membeberkan hasil tes kesehatan tersebut.

Wawan mengaku, hasil tes kesehatan baru akan dirapatplenokan pada hari ini (29/9) dan akan disampaikan kepada para paslon pada 30 September besok. "Berkas hasil pemeriksaan sudah kami terima. Tapi baru akan kami buka besok saat pleno," katanya.

Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Kiswarjanu mengatakan, sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas timnya dalam pe-

meriksaan kesehatan dua pasangan bakal calon. Namun demikian, dia enggan mengungkapkan hasilnya seperti apa.

Menanti Kebijakan Lingkungan

Pertarungan Pilwali Kota Yogyakarta 2017 diprediksi berlangsung sengit. Wali Kota Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Imam Priyono, maju sebagai bakal calon wali kota dengan

kendaraan politiknya masing-masing. Namun masih membeberkas di masyarakat janji politik mereka saat kampanye Pilwali 2011 yang belum dibuktikan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta Halik Sandra menilai permasalahan utama Kota Yogyakarta yang mendapat sorotan publik adalah soal pengelolaan lingkungan.

Ke Hal 10

Gagal Tes Kesehatan, Calon Wajib Diganti

((Dari Hal 9

Walhi mencatat, salah satu komitmen mereka lima tahun ke belakang berupa penyediaan ruang terbuka hijau publik sebanyak 20% dari total luas wilayah sampai saat ini belum terealisasi. "Justru kebijakan terkait lingkungan sangat lemah. Tak ada kontrol ketat soal pemanfaatan ruang dan lahan," katanya, kemarin.

Maraknya pendirian hotel baru, pesatnya pembangunan properti, hingga menurunnya kualitas air tanah menjadi salah satu indikator kinerja mereka belum maksimal. Belum lagi sorotan publik soal kesemrawutan sistem transportasi di Kota Yogyakarta. "Daya dukung lahan sudah terlampau.

Salah satu faktornya juga kontrol perizinan yang kerap dikhianati masyarakat," katanya.

Karena tak ada pilihan bakal calon alternatif, mau tak mau masyarakat Kota Yogyakarta harus memilih salah satu dari dua *incumbent* tersebut. Upaya yang bisa dilakukan guna memperbaiki kualitas lingkungan adalah memberi tantangan kepada mereka agar berani membuat pakta integritas, khususnya perlindungan kepada lingkungan hidup.

"Tidak hanya janji kampanye, tapi harus tercermin dalam kebijakan yang diambil. Para *incumbent* harus berjanji memberi porsi lebih pada politik anggaran untuk perbaikan lingkungan. Jika dalam rencana

pembangunan kedua *incumbent* tak terlihat anggaran perlindungan lingkungan, maka itu indikator bahwa mereka tak berkomitmen melakukan perubahan," ucapnya.

Koordinator Pemerti Code, komunitas masyarakat peduli lingkungan dan sungai, Totok Pratopo, minta agar wali kota dan wakilnya yang terpilih nanti harus turun langsung untuk memimpin program Mundur Gunung Madhep Kali (M3K) di Kali Code. Pemerintah harus membentuk tim karena dana dari pusat yang sudah tersedia sangat tergantung kesiapan wali kota dan wakilnya.

Totok juga menantang bagi yang terpilih nanti agar merealisasikan gagasan wisata Ka-

li Code dengan membuka akses dari kawasan parkir Abu Bakar Ali. "Jika pemerintah terkendala dana, bisa menggandeng swasta," katanya.

Salah seorang warga Kota Yogyakarta, Gilang Pradita, juga berharap siapa pun yang terpilih nanti tidak akan mementingkan kepentingan kelompok atau partai politik penguasa.

Menurut warga Umbulharjo itu, seorang kepala daerah adalah pejabat publik sehingga idealnya kebijakan harus untuk masyarakat. "Bukan justru memikirkan kepentingan sekelompok tertentu saja, apalagi tersandera oleh kepentingan parpol," ujarnya.

Persoalan pendirian tower

seluler ilegal juga menjadi perhatian warga. Selain didirikan di ruang publik, ada juga tower yang dibangun ilegal di kawasan cagar budaya. Mereka diminta menyelesaikan persoalan itu.

Salah satunya tower dibangun di Jalan Harjowinatan, barat kompleks Puro Pakualaman. Warga sekitar merasa tak diajak sosialisasi sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi *incumbent* soal pengawasan pendirian bangunan. "Warga tak pernah diajak sosialisasi. Kelurahan juga tak tahu ada pendirian tower. Itu yang kadang ngawur," kata kerabat Puro Pakualaman, KPH Kusumo Parasto.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005